

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
**SUB UNIT KERJA** : SUB AUDITORAT LAMPUNG I

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MYRTO HANDAYANI
2. Jabatan : KEPALA SUB AUDITORAT
3. NHK : 675119

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.174.900.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/90 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 593 m2/220 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.473.000.000		
3. Tanah Seluas 400 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. Tanah Seluas 638 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 31.900.000		
5. Tanah Seluas 5000 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>610.000.000</b>
1. MOBIL, INNOVA G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
2. MOBIL, INNOVA V A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>204.130.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.190.550</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>345.661.503</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.350.882.053</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.015.423.494</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.335.458.559</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Oktober 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.